

ANALISIS YURIDIS PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUMATERA UTARA DALAM PENENTUAN KAWASAN HUTAN

Rita Wahyuni*
Dr. Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N**
Dr. Muhammad Faisal, S.H.,M.H***

ABSTRAK

Adanya kepastian status kawasan hutan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola hutan yang baik. Namun dengan adanya kesalahan prosedur penetapan kawasan hutan di masa lalu yang hingga saat ini belum diperbaiki, menjadi salah satu kendala besar untuk mewujudkan kepastian kawasan hutan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dalam penentuan kawasan hutan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan Sumatera Utara, bagaimana kewenangan dinas lingkungan hidup dan kehutanan Sumatera Utara dalam penentuan Kawasan hutan, bagaimana kendala dan Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera Utara dalam penentuan Kawasan hutan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normative (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*field research*).

Pengaturan hukum dalam penentuan kawasan hutan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan Sumatera Utara diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. penentuan kawasan hutan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan Sumatera Utara merupakan konsep perwilayahan pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan secara optimal, lestari, dan berkeadilan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPH diharapkan menjadi pusat informasi mengenai potensi dan ancaman terhadap kawasan hutan, perubahan-perubahannya, serta kondisi sosial budaya masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar hutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dinas lingkungan hidup dan kehutanan Sumatera Utara dalam penentuan Kawasan hutan adalah mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan konsepsi penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera Utara dalam penentuan Kawasan hutan adalah adanya dualisme kebijakan pemerintah

Kata Kunci: Peran, Kawasan, Hutan

* Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**LEGAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE NORTH SUMATERA
ENVIRONMENT AND FORESTRY SERVICE
IN DETERMINING FOREST AREA**

Rita Wahyuni*
Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N**
Dr. Muhammad Faisal, S.H.,M.H***

ABSTRACT

The certainty of forest area status is an important prerequisite for the realization of good forest governance. However, with the existence of procedural errors in determining forest areas in the past which have not been corrected until now, it has become one of the major obstacles to realizing the certainty of the forest area. The formulation of the problem in this study is how the legal regulations in determining forest areas by the North Sumatra Environmental and Forestry Service, how the authority of the North Sumatra Environmental and Forestry Service in determining Forest Areas, what are the obstacles and efforts of the North Sumatra Environmental and Forestry Service in determining Forest Areas.

This study uses a descriptive method through a normative approach (legal research) to obtain secondary data and an empirical approach (juridical sociological), to obtain primary data through field research.

The legal regulations in determining forest areas by the North Sumatra Environmental and Forestry Service are regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. Determination of forest areas by the North Sumatra Environmental and Forestry Service is a concept of forest management zoning to achieve optimal, sustainable, and equitable forest management in accordance with its main function and designation. To achieve these goals, KPH is expected to become an information center regarding the potential and threats to forest areas, changes, and socio-cultural conditions of communities in and around the forest.

The results of the study indicate that the authority of the North Sumatra Environmental and Forestry Service in determining Forest Areas is to regulate and manage everything related to forests, forest areas, and forest products in accordance with the concept of control of Natural Resources (SDA) as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. The constraints of the North Sumatra Environmental and Forestry Service in determining Forest Areas are the dualism of government policies

Keywords: Role, Area, Forest

**Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of Law Program, Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*